



**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO RUMAH TANGGA MISKIN DI DESA  
SUCOPANGEPOK KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER**

*The Empowerment of Micro Household Poor in the Sucopangepok Village Jelbuk  
Sub District Jember*

**SKRIPSI**

Oleh

**Hesty Imaniar Indriati**

**NIM 080910201051**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**



**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO RUMAH TANGGA MISKIN DI DESA  
SUCOPANGEPOK KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER**

*The Empowerment of Micro Household Poor in the Sucopangepok Village Jelbuk  
Sub District Jember*

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Administrasi Negara (S1) dan mencapai gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Oleh

**Hesty Imaniar Indriati**

**NIM 080910201051**

**PROGRAM STUDI1 ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI  
FAKULTAS ILMU SOSIAL ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibu Sunjarwati yang telah melahirkan, menunggu, memotivasi, mendoakan, maaf dan terima kasih;
2. Bapak Heri Nordiyanto, S.E, terima kasih atas kasih sayang yang tersirat;
3. Papa Untung Sudibyoy, S.H dan Mama Ninik Lestariyanti, terima kasih atas perhatian dan kasih sayang;
4. Adik-adikku Dwi Anggraeni Puspita dan Achmad Tri Bagus Pamungkas yang selalu menjadi motivasiku;
5. Guru-guruku sejak dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
6. Almamater Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

### MOTTO

Hidup memang menantang. Hidup kadang melempar, kadang menampar. Tapi hidup terlalu megah untuk diakhiri oleh diri sendiri.

(Iwan Setyawan)\*

Betapapun takutnya dirimu, kau harus melaluinya apabila kau menginginkannya. Mereka yang berhasil bertahan dan melaluinya adalah orang terkeren di dunia.

(Park Shi On)\*\*

---

\* Iwan Setyawan. 2012. *Ibuk*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.

\*\* Shi On, Park. 2013. *Good Doctor*. <http://kuqudramkor.blogspot.co.id/2013/11/quotes-good-doctor.html> (08 November 2015).

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hesty Imaniar Indriati

NIM : 080910201051

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin Di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 15 Desember 2015  
Yang menyatakan,

Hesty Imaniar Indriati  
NIM 080910201051

**SKRIPSI**

**PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO RUMAH TANGGA MISKIN DI DESA  
SUCOPANGEPOK KECAMATAN JELBUK KABUPATEN JEMBER**

*The Empowerment of Micro Household Poor in the Sucopangepok Village Jelbuk  
Sub District Jember*

Oleh

**Hesty Imaniar Indriati**  
**NIM 080910201051**

Pembimbing:

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si

Dosen Pembimbing Pendamping : Drs. Agus Suharsono, M.Si

## RINGKASAN

Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin Di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember; Hesty Imaniar Indriati, 080910201051, 2015: 112 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara; Jurusan Ilmu Administrasi; Fakultas Ilmu Sosial dan Politik; Universitas Jember.

Kemiskinan adalah masalah klasik yang dihadapi bangsa Indonesia sejak dulu. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 yang diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Regulasi ini merupakan bagian dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan kesepakatan dalam MDGs. Adapun wujud dari keseriusan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan tersebut yaitu dengan menciptakan program pemberdayaan masyarakat. Salah satu program untuk mengatasi kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja yaitu Program Pemberdayaan Rumah Tangga Miskin.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive Sampling*. Untuk tahap pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk analisis data adalah reduksi data.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada tahapan kegiatan pemberdayaan rumah tangga miskin meliputi tahap penguatan intuisi, pada tahap ini kegiatannya adalah mencari tokoh masyarakat yang memiliki jiwa sosial tinggi, kemudian tokoh tersebut dibekali untuk kemudian dijadikan kelompok masyarakat (pokmas). Pokmas kemudian dibentuk dan dibekali berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan. Pokmas ini kemudian melakukan rembuk untuk mengkaji kemiskinan yang dialami masyarakat, setelah mengetahui penyebab kemudian mencoba mengatasi kemiskinan dengan potensi wilayah yang dimiliki desa atau dusun. Hal ini diharapkan dapat dikembangkan dan menjadi tumpuan perekonomian masyarakat. Kemudian pokmas diajari pelatihan usaha mikro, mulai dari proses penyediaan bahan mentah hingga selling, pembukuan dan sebagainya. Selanjutnya adalah pembentukan LKMM, lembaga ini nantinya yang akan menyediakan modal bantuan kepada rumah tangga miskin sesuai dengan ketentuan, sehingga Pengurus LKMM dibekali dengan sejumlah pengetahuan. Pembekalan juga dilakukan kepada pokmas berkaitan dengan kewirausahaan, hingga pengelolaan modal. Tahap selanjutnya adalah pendampingan, monitoring, dan evaluasi. Pihak operasi menugaskan petugas teknis untuk mendampingi kegiatan pemberdayaan, selain itu juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha, perguliran dana, dan peningkatan pendapatan RTM seperti kegiatan administrasi, membuat laporan, memasukkan dalam neraca dan

sebagainya. Tahapan selanjutnya adalah bantuan permodalan sebesar 25.000.000,00. Pelaksanaan pemberdayaan ini dilakukan sesuai dengan PTO, meski dilapangan ternyata bantuan permodalan ini tidak bisa bergulir. Hal ini salah satunya diakibatkan karena karakter masyarakat yang menilai bahwa bantuan ini cuma-cuma dan tidak perlu dikembalikan.



## PRAKATA

Syukur Alhamdulillah atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin Di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Administrasi Progam Studi Ilmu Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Edy Wahyudi, S. Sos, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Ibu Dr. Anastasia Murdyastuti, M. Si, selaku pembimbing utama dan selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Drs. Agus Suharsono, M.Si, selaku Dosen Pembimbing pendamping yang telah banyak pengarahan dalam skripsi ini;
5. Drs. A. Kholiq Azhari, M. Si selaku dosen wali yang telah membantu dan mendukung;
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
7. Keluarga besar Moch. Dahlan dan Soemadi yang telah mendukung dan mendoakan;
8. Sahabat kembarku, Nimas Migi Berghiani, terima kasih atas dukungan dan doanya. Terima kasih, Gepeng.

9. Sahabat Baraone, untuk Arien, Trista, Wulan, Alvi, Yoan, Kiki, Mahandy, Rico dan Fikri. Terima kasih atas pembullyannya, karena dibalik bullyan ada doa tersirat.
10. Sahabat perjuangan dan terkasih, Melinda, Meme, Devy, Maretta, Fhara, Erwin, dan Iffa. Terima kasih atas dukungan dan doa yang sangat berarti.
11. Sahabat Gogumas International, Anita dan Lia. Terima kasih atas doa kalian di dunia maya.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian karya ilmiah ini khususnya kepada saudara-saudaraku Administrasi Negara Angkatan 2008. Sebagai karya ilmiah, tentu masih terdapat kekurangan sehingga penulis mengharapkan segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Jember, 15 Desember 2015

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	v
<b>HALAMAN PEMBIMBING</b> .....	vi
<b>RINGKASAN</b> .....	vii
<b>PRAKATA</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvii
<b>BAB 1. PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>1.1 Latar Belakang</b> .....	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b> .....	10
<b>1.3 Tujuan Penelitian</b> .....	10
<b>1.4 Manfaat Penelitian</b> .....	12
<b>BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	12
<b>2.1 Konsepsi Dasar</b> .....	12
<b>2.2 Kebijakan public</b> .....	12
<b>2.3 Pemberdayaan</b> .....	16
2.1.1 Pengertian Pemberdayaan .....	16

2.1.2 Tujuan Pemberdayaan.....	20
2.1.3 Tahap-tahap Pemberdayaan .....	21
2.1.4 Indikator Keberdayaan.....	22
2.1.5 Model-model Pemberdayaan .....	24
<b>2.4 Konsep Program .....</b>	<b>28</b>
<b>2.5 Usaha Mikro.....</b>	<b>30</b>
<b>2.6 Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga</b>	
<b>Miskin (PUM-RTM).....</b>	<b>33</b>
<b>BAB 3. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian .....</b>	<b>37</b>
<b>3.2 Fokus Penelitian.....</b>	<b>37</b>
<b>3.3 Penentuan Lokasi penelitian .....</b>	<b>38</b>
<b>3.4 Sumber dan Jenis Data .....</b>	<b>39</b>
<b>3.5 Penentuan Informan.....</b>	<b>40</b>
<b>3.6 Teknik Pengumpulan Data .....</b>	<b>41</b>
3.6.1 Observasi.....	41
3.6.2 Wawancara.....	42
3.6.3 Dokumentasi .....	42
3.6.4 Studi Pustaka.....	43
<b>3.7 Metode Analisis Data.....</b>	<b>43</b>
3.7.1 Reduksi Data.....	44
3.7.2 Penyajian Data .....	44
3.7.3 Penarikan Kesimpulan .....	45
<b>3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
<b>4.1 Deskripsi Daerah Penelitian .....</b>	<b>46</b>
<b>4.2 Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Sucopangepok .....</b>	<b>46</b>
4.2.1 Gambaran umum Dinas Koperasi .....	50

<b>4.3 Pelaksanaan pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin di desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember .....</b>	<b>64</b>
4.3.1 Tahapan Penguatan Institusi .....	65
4.3.2 Tahapan Pendampingan, Monitoring, Dan Evaluasi .....	100
4.3.3 Tahapan Bantuan Permodalan .....	109
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
<b>5.1 Kesimpulan .....</b>	<b>111</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>112</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data IPM Jawa Timur Tahun 2013-2014 .....	2
Tabel 1.2 Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Jember Sampai Maret Tahun 2014	5
Tabel 1.4 Perhitungan Laba/Rugi LKMM di Kecamatan Jelbuk .....	10
Tabel 4.1 batas wilayah dari Kelurahan Sucopangepok .....	47
Tabel 4.2 Pertumbuhan jumlah penduduk di Kelurahan Sucopangepok tahun 2013-2014.....	48
Tabel 4.3 Jumlah kepala Keluarga di Kelurahan Sucopangepok.....	49
Tabel 4.4 Usia penduduk di Kelurahan Sucopangepok .....	50
Tabel 4.5 Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Sucopangepok tahun 2014.....	50
Tabel 4.6: Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Pemberdayaan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Jember Terhadap Sasaran Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin Di Desa Sucopangempok .....	117

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Lingkaran setan kemiskinan..... 21



**DAFTAR LAMPIRAN**

- A. Surat Ijin Melakukan Penelitian dari Lemlit Universitas Jember**
- B. Surat Rekomendasi Penelitian dari Bakesbangpol**
- C. Surat ijin penelitian untuk LKMM Kabupaten Jember**
- D. Surat selesai penelitian dari LKMM atau Kecamatan Jelbuk**
- E. Salinan keputusan Bupati Jember tentang pelimpahan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah**
- F. Salinan keputusan Bupati Jember tentang hibah kepada badan/lembaga**
- G. Surat keputusan Kepala Dinas Koperasi, UMKM Tentang SOP PUM-RTM**
- H. Salinan Peraturan Bupati**
- I. Surat Keputusan Bupati tentang Petunjuk Teknis PUM-RTM**
- J. Pedoman wawancara**

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Penduduk Indonesia lebih dari 110 juta masih hidup dalam kemiskinan dengan penghasilan kurang dari US\$ 2 per hari, bahkan sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara bertempat tinggal di Indonesia. Tingginya angka kemiskinan merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri. Persediaan makanan mereka sering kali tidak memadai, atau bahkan harus menderita kelaparan. Mereka tidak memiliki tempat tinggal, atau kalau pun ada, ukurannya begitu kecil dan dalam kondisi tidak layak. Banyak dari masyarakat tidak mengenyam pendidikan dan buta huruf. Kesehatan mereka juga tidak begitu baik atau bahkan buruk, namun tak bisa memeriksakan diri. Mereka umumnya menganggur, atau jika bekerja, pendapatan yang diperoleh sangatlah kecil. Sebagaimana kecenderungan yang terjadi pada negara-negara sedang berkembang, keberadaan mereka cenderung terkonsentrasi di wilayah perdesaan dibandingkan perkotaan (UNDP report, 2007) .

Menurut Rais (1995:9), “kemiskinan adalah kondisi *deprives* terhadap sumber-sumber pemenuhan kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan dasar, sedangkan kesenjangan adalah ketidakmerataan akses terhadap sumber ekonomis yang dimiliki”. Berdasarkan kelima *deprivation trap* tersebut, kerentanan dan ketidakberdayaan merupakan penyebab yang paling utama. Hal ini didukung juga oleh Suyanto (1996:13) yang menyatakan, “kemiskinan bukan sekedar persoalan kurangnya atau akses yang rendah terhadap lalu-lintas uang dan barang. Tetapi, kemiskinan sesungguhnya juga berkaitan dengan empat dimensi kemiskinan lain, yaitu kerentanan, kelemahan jasmani, tingkat isolasi dan ketidakberdayaan...”.

Salah satu fakta kemiskinan masih banyak ditemui salah satunya Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jumlah penduduk miskin yang tinggi di Kabupaten Jember menjadikan sebagai salah satu wilayah dengan Indek Pembangunan Manusia (IPM) pada urutan bawah di Propinsi Jawa Timur (BPS Jawa Timur, 2014) seperti Tabel 1.1

Tabel 1.1 Data IPM Jawa Timur Tahun 2012-2014

No	Nama Daerah	IPM			No	Nama Daerah	IPM		
		2012	2013	2014			2012	2013	2014
1	Kota Blitar	75,88	76,60	76,98	20	Kab. Nganjuk	69,25	69,73	70,27
2	Kota Surabaya	75,87	76,36	76,82	21	Kab. Ponorogo	68,55	69,07	69,75
3	Kota Malang	75,72	76,19	76,69	22	Kab. Madiun	68,24	68,63	69,28
4	Kota Mojokerto	75,66	76,11	76,43	23	Kab. Lamongan	67,88	68,33	69,03
5	Kota Madiun	75,42	75,89	76,23	24	Kab. Ngawi	67,52	68,02	68,41
6	Kab. Sidoarjo	74,87	75,35	75,88	25	Kab. Banyuwangi	67,24	67,80	68,36
7	Kota Kediri	74,45	75,11	75,68	26	Kab. Tuban	66,61	67,02	67,68
8	Kab. Gresik	73,00	73,49	73,98	27	Kab. Lumajang	66,20	66,65	67,26
9	Kota Batu	72,83	73,33	73,88	28	Kab. Malang	65,52	66,02	66,84
10	Kota Probolinggo	72,76	73,29	73,73	29	Kab. Pasuruan	65,52	66,02	66,84
11	Kab. Blitar	72,28	72,74	73,22	30	Kab. Bojonegoro	65,50	65,83	66,38
12	Kota Pasuruan	72,20	72,60	73,01	31	Kab. Sumenep	63,71	64,24	64,82
13	Kab. Mojokerto	71,99	72,51	72,93	<b>32</b>	<b>Kab. Jember</b>	<b>63,27</b>	<b>63,71</b>	<b>64,33</b>
14	Kab. Tulungagung	72,00	72,45	72,93	33	Kab. Bangkalan	62,97	63,40	64,00
15	Kab. Trenggalek	71,68	72,15	72,72	34	Kab. Pamekasan	62,49	63,13	63,81
16	Kab. Jombang	71,44	71,85	72,33	35	Kab. Situbondo	62,64	63,06	63,69
17	Kab. Magetan	71,20	71,79	72,32	36	Kab. Probolinggo	60,97	61,44	62,13
18	Kab. Pacitan	70,48	70,91	71,45	37	Kab. Bondowoso	60,76	61,26	62,11
19	Kab. Kediri	70,39	70,85	71,33	38	Kab. Sampang	56,99	57,66	58,68

Sumber data: BPS Jawa Timur, Tahun 2014

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan data IPM untuk Kabupaten Jember berada di urutan tujuh dari bawah dan itu menunjukkan bahwa Kabupaten Jember dilihat dari kualitas dan kapabilitas manusia Indonesia yang meliputi tingkat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, masih relatif tertinggal. Kondisi tersebut menyiratkan

bahwa kemiskinan masih merupakan fenomena yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, yang menyebutkan jumlah rumah tangga miskin tahun 2013 di Kabupaten Jember mencapai angka 370.000 dan menjadikan Jember sebagai kabupaten dengan penduduk miskin terbesar di Propinsi Jawa Timur (Antara, 2013).

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat puluhan juta penduduk Indonesia masih tergolong miskin. Jumlahnya mencapai 29,89 juta jiwa per September 2014 atau setara 12,36 persen dari total penduduk Indonesia (*release* data per Januari 2014). Rinciannya, jumlah penduduk sangat miskin pada periode itu sebanyak 10,09 juta jiwa atau 4,17 persen. Sedangkan penduduk miskin 19,79 juta jiwa, atau 8,19 persen dari total jumlah penduduk. Data BPS juga menyebutkan jumlah penduduk hampir miskin mencapai 27,82 juta jiwa atau 11,5 persen (Media Info, 2014).

Penduduk miskin di Indonesia lebih banyak berada di wilayah pedesaan, tentu hal ini paling berdampak bagi daerah-daerah yang sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah pedesaan, karena daerah dengan kondisi demikian akan cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Satu di antaranya adalah Kabupaten Jember. Kemiskinan di Kabupaten Jember dapat dilihat dari jumlah rumah tangga miskin seperti pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Jember  
Sampai Maret Tahun 2014

Nama Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga			Total
	Kelompok 1 *)	Kelompok 2 *)	Kelompok 3 *)	
Kencong	849	1,447	2,034	4,33
Gumuk Mas	913	1,647	2,468	5,028
Puger	1,338	2,192	3,123	6,653
Wuluhan	1,329	2,321	3,161	6,811
Ambulu	1,431	2,146	3,324	6,901
Tempurejo	2,495	3,214	3,761	9,47
Silo	4,961	5,075	4,069	14,105
Mayang	2,471	2,723	2,332	7,526
Mumbulsari	3,869	4,305	3,376	11,55
Jenggawah	2,257	2,608	2,75	7,615
Ajung	2,584	2,65	2,766	8
Rambipuji	1,698	2,099	2,157	5,954
Balung	1,573	2,013	2,092	5,678
Umbulsari	1,154	1,927	2,698	5,779
Semoro	948	1,326	1,568	3,842
Jombang	1,131	1,127	1,402	3,66
Sumber Baru	4,471	4,647	4,398	13,516
Tanggul	2,665	3,221	2,754	8,64
Bangsalsari	3,238	4,776	5,183	13,197
Panti	1,843	2,638	2,92	7,401
Sukorambi	1,411	1,832	1,665	4,908
Arjasa	2,13	2,361	1,879	6,37
Pakusari	2,228	2,591	2,081	6,9
Kalisat	4,244	4,471	3,532	12,247
Ledokombo	4,216	5,08	3,739	13,035
Sumberjambe	3,882	4,401	3,662	11,945
Sukowono	3,051	4,092	4,166	11,309
<b>Jelbuk</b>	<b>2,261</b>	<b>2,367</b>	<b>2,101</b>	<b>6,729</b>
Kaliwates	1,073	1,553	1,954	4,58
Sumber Sari	1,698	2,191	1,768	5,657
Patrang	1,755	2,407	2,565	6,727
<b>Jumlah</b>	<b>71,167</b>	<b>87,448</b>	<b>87,448</b>	<b>246,063</b>

Sumber: Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial, Maret 2014

Kelompok 1 adalah rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan sampai dengan 10% terendah di Indonesia

Kelompok 2 adalah Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 11% - 20% terendah di Indonesia

Kelompok 3 adalah Rumah Tangga/Individu dengan kondisi kesejahteraan antara 21% - 30% terendah di Indonesia

Menurut Suyanto (1996:7), “masyarakat miskin pada umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya kepada kegiatan ekonomi sehingga seringkali makin tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masalah kemiskinan yang terjadi pada umumnya berhubungan dengan masalah lemahnya kemampuan masyarakat dalam berusaha dan terbatas akses kegiatan ekonomi yang mereka pilih. Oleh karena itu, masalah kemiskinan harus di atasi dengan melakukan pembangunan di segala aspek agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraannya. Salah satunya adalah pembangunan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang merupakan indikator keberhasilan pembangunan di suatu negara. Todaro (2004:41) menjelaskan pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan.

Pembangunan di Kabupaten Jember tetap menempatkan pengentasan kemiskinan pada prioritas utamanya dalam menghadapi kondisi kemiskinan. Selain itu, langkah ini juga sebagai bentuk dukungan untuk mensukseskan pembangunan nasional, yang sejak awal tahun 2000 mengadopsi konsep *Millenium Development Goals* (MDGs) yang disepakati oleh PBB berupa target bersama 184 negara (Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Jember, 2005:1). Sebagaimana diketahui konsep terbaru pembangunan nasional tersebut menetapkan penanggulangan kemiskinan sebagai satu dari delapan tujuan yang hendak dicapainya pada tahun 2015. Delapan tujuan MDGs tersebut meliputi:

- a. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan
  - 1) Mereduksi proporsi jumlah penduduk dengan konsumsi kurang dari US\$ 1 per hari
  - 2) Mereduksi proporsi jumlah penduduk yang menderita kelaparan
- b. Mewujudkan pendidikan dasar yang universal
- c. Meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan
- d. Mengurangi tingkat kematian anak dan meningkatkan kesehatan ibu hamil
- e. Memberantas HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya
- f. Menjaga kelestarian lingkungan
- g. Mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan negara dan mengurangi kepunahan sumber daya alam
- h. Membangun kerjasama global untuk pembangunan, termasuk akses pasar
  - 1) Mengurangi tarif rata-rata untuk produk-produk pertanian
  - 2) Mengurangi subsidi pertanian domestik dan ekspor di negara-negara OECD (*United Nation Development Programe* dalam Ginting, 2009:7).

Seperti wilayah-wilayah lain di Indonesia, pengadopsian konsep MDGs membawa perubahan besar terhadap strategi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jember. Orientasi MDGs pada pembangunan manusia sebagai wujud konsep pembangunan yang berkualitas. Dengan berorientasi pada pembangunan manusia, maka strategi pengentasan kemiskinan yang digunakan adalah menempatkan masyarakat miskin sebagai aktor utama dalam pembangunan nasional, yang terlibat langsung dalam setiap tahapan kegiatan, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas

di wilayahnya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestarian.

Sebagaimana dikemukakan Gran dan Korten (dalam Surjono dan Nugroho, 2008:22), bahwa model pembangunan berpusat pada manusia memberi peran kepada individu bukan hanya sebagai subyek, melainkan sebagai aktor yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses yang memengaruhi kehidupannya. Adapun tujuan utama melibatkan kaum miskin dalam pembangunan mereka sendiri adalah "...pertumbuhan manusia yang didefinisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari potensi-potensi manusia" (Korten dan Sjahrir, 1998:374).

Dalam melaksanakan pembangunan yang berorientasi MDGs pada pembangunan manusia, maka pembangunan di Kabupaten Jember melalui UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengatur otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga dibuktikan pada tujuan diadakannya otonomi daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 adalah:

“mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Berdasarkan tujuan otonomi daerah dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, pembangunan daerah melalui otonomi daerah, dimana salah satunya bertujuan untuk memberdayakan masyarakat lokal (setempat) sehingga memungkinkan masyarakat lokal untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tentram dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan (*choices*) yang dapat dilakukan masyarakat. Tujuan pembangunan daerah melalui pemberdayaan tersebut menunjukkan bahwa untuk mengubah kondisi kemiskinan diperlukan pemberian kesempatan kepada masyarakat miskin untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan

yang mereka tentukan. Disamping itu, masyarakat miskin juga diberikan kekuasaan untuk mengelola dana sendiri, baik yang berasal dari pemerintah maupun pihak lain (Sulistiyani, 2004:75).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melakukan Pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah. Menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2007:9) bahwa pemberdayaan usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. “ pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha;
- b. Fasilitasi perkuatan modal”.

Sulistiyani (2004:79) menyatakan, “pemberdayaan adalah untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya”.

Kabupaten Jember merupakan salah satu wilayah di propinsi Jawa Timur yang sebagian besar masyarakat miskinnya dari golongan pengusaha mikro. Namun, mereka sulit untuk mengakses permodalan untuk usahanya. Pada umumnya, mereka mengalami permasalahan seperti agunan, perijinan, hingga kelayakan usaha ketika mencoba mengakses modal usaha melalui lembaga keuangan (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember dalam Hermawan, 2011:3).

Merespon kondisi dan ketidakberdayaan masyarakat miskin dari golongan pengusaha mikro tersebut, maka Dinas Koperasi dan UMKM membuat suatu inovasi yaitu program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM). Hal ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Jember Nomor: 518/1156/463.313/2005 tentang petunjuk teknis Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2005:2).

Program PUM-RTM merupakan program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan ekonomi yang berbasis pada penguatan institusi. Adapun sasaran dalam

program PUM-RTM itu secara spesifik dikhususkan kepada masyarakat miskin yang menjalankan usaha mikro. Kegiatan PUM-RTM terdiri dari 3 tahap yaitu tahap penguatan institusi, tahap penguatan modal usaha dan tahap peningkatan keterampilan. Kegiatan PUM-RTM akan bermuara pada terbentuknya 2 institusi yaitu institusi ekonomi yang bernama LKMM (Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat) dan institusi sosial yang bernama pokmas (kelompok masyarakat) (Dinas Koperasi LKMM Kabupaten Jember, 2005:4).

Namun dalam pelaksanaan program tersebut, masih terdapat fenomena yang ada dalam perkembangan dana. Pada umumnya, dananya masih dalam bentuk hadiah atau *charity*, sehingga pengembangan usaha kurang maksimal dan cenderung tidak teralokasi optimal. Seperti kita ketahui bahwa permasalahan terbesar dari usaha mikro kecil dan menengah, selama ini adalah sulitnya mereka untuk mendapatkan modal usaha yaitu *start up Capital* atau modal awal, kesulitan memperoleh bahan baku yang berkualitas, keterbatasan teknologi dan sumberdaya Manusia (SDM), khususnya kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*) termasuk manajemen dan pemasaran.

Kabupaten Jember memiliki 31 Kecamatan. Bila berdasarkan pada tabel 1.3 diatas, Kecamatan Jelbuk bukanlah kecamatan yang masyarakat rumah tangga miskinnya paling tinggi. Namun dikarenakan pada kecamatan Jelbuk, pelaksanaan program PUM-RTM pada LKMM-nya banyak yang mengalami kerugian. Berikut jumlah LKMM di Kecamatan Jelbuk dijelaskan Tabel 1.3.

Tabel 1.4 Perhitungan Laba/Rugi LKMM di Kecamatan Jelbuk

No.	LKMM	Desa	Pendapatan (Rp)	Biaya-Biaya (Rp)	Labarugi (Rp)
1.	Krajan Barat	Jelbuk	4,585,450	2,966,000	1,619,000
2.	Sumber Tengah	Panduman	6,404,000	4,310,000	2,094,000
3.	<b>Sudung Timur</b>	<b>Sukowiryo</b>	<b>1,148,750</b>	<b>1,375,000</b>	<b>(226,250)</b>
4.	<b>Nurul Hidayah</b>	<b>Sucopangepok</b>	<b>97,000</b>	<b>700,000</b>	<b>(603,000)</b>
5.	<b>Nurul Huda</b>	<b>Sucopangepok</b>	<b>280,750</b>	<b>866,000</b>	<b>(585,250)</b>

6.	Barokah Jaya	Sucopangepok	4,739,300	1,651,541	3,087,759
7.	Al-Qomariyah	Sucopangepok	5,835,500	1,563,000	4,272,000
8.	Ar-Rahman	Suger kidul	268,750	100,000	168,750
<b>9.</b>	<b>Krajan Timur</b>	<b>Jelbuk</b>	<b>716,500</b>	<b>1,730,000</b>	<b>(1,013,500)</b>
<b>10.</b>	<b>Tenggir Barat</b>	<b>Jelbuk</b>	<b>1,580,750</b>	<b>2,393,500</b>	<b>(812,700)</b>

Data diolah dari Dinas Koperasi dan UMKM (2014).

Tabel 1.3 menunjukkan bahwa LKMM yang mengalami kerugian dan macet terdapat 5 LKMM, jumlahnya sebanding dengan yang masih aktif. Kerugian tersebut dikarenakan pada biaya-biaya, nilainya lebih besar daripada pendapatannya. Hal ini, disebabkan LKMM-LKMM tersebut masih belum mampu dan minimnya pelatihan dalam mengatur keuangan. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Jelbuk, tepatnya di desa Sucopangepok karena di desa tersebut terdapat 4 LKMM, diantaranya 2 masih aktif dan 2 LKMM lainnya mengalami rugi yaitu LKMM Nurul Hidayah dan Nurul Huda. Maka, peneliti akan terfokus pada LKMM yang hanya terdapat di desa Sucopangepok saja. Hal ini didukung pernyataan Bapak Agus Edi Susanto (dalam wawancara awal pada 2 Desember 2012), yang juga selaku Kasi Usaha Mikro Dinas Koperasi LKMM Kabupaten Jember mengatakan bahwa “Kecamatan Jelbuk yang dialokasikan dalam 10 LKMM, yang tidak jalan atau macet ada 5 dan beberapa diantaranya ada di Sucopangepok”.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa masalah kemiskinan dapat diatasi bila pelaksanaan pembangunan tepatnya melalui pemberdayaan mampu dikelola dengan baik. Maka, peneliti ingin mengungkap lebih mendalam tentang bagaimana pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin dalam mengatasi masalah kemiskinan sehingga masyarakat lebih berdaya.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik meneliti tentang **“Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang wajib ada dalam suatu penelitian, karena rumusan masalah adalah pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan masalah yang harus dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2011:206). Berdasarkan pendapat tersebut, maka masalah yang dapat dirumuskan oleh peneliti adalah **“Bagaimana pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin di desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember?”**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengemukakan hasil-hasil yang hendak dicapai dan tidak boleh menyimpang dari permasalahan yang telah dikemukakan. Menurut Moleong (2005:94) mengatakan bahwa “tujuan suatu penelitian ialah upaya untuk memecahkan masalah”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin di desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

## 1.4 Manfaat Penelitian.

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Manfaat Akademis

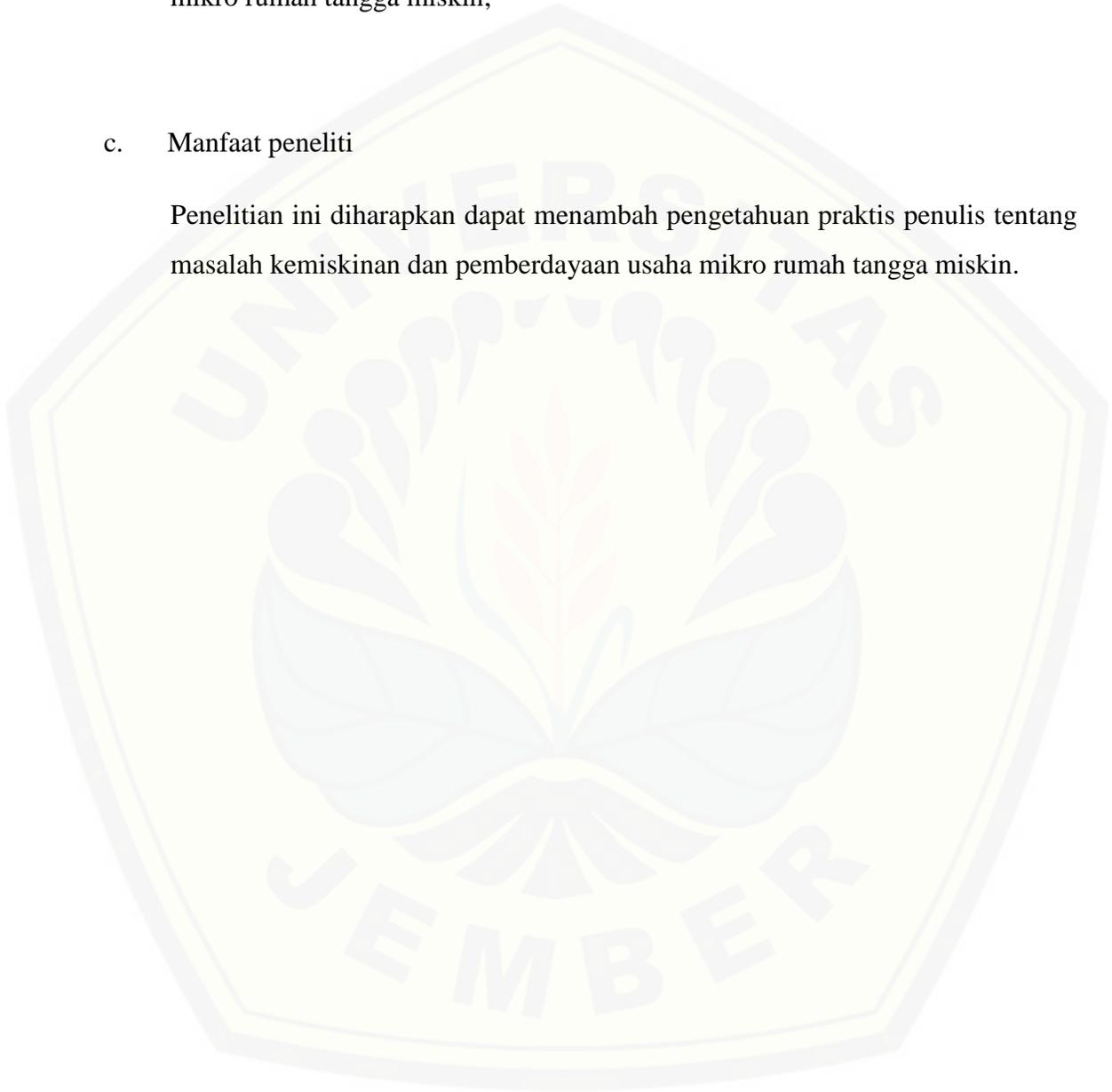
Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi pengetahuan khususnya kajian Ilmu Administrasi Negara dan menjadi bahan dasar bagi peneliti selanjutnya dalam penelitian yang sama dengan kajian yang lebih mendalam tentang masalah kemiskinan dan pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin;

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan bagi Dinas koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah Kabupaten Jember dalam pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin;

c. Manfaat peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan praktis penulis tentang masalah kemiskinan dan pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin.



## **BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsepsi Dasar**

Konsep digunakan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Konsep ini dapat menyederhanakan pemikiran dengan menggunakan suatu istilah untuk beberapa kejadian yang saling berkaitan. Untuk lebih jelasnya, Singarimbun dan Effendi (2008:34) mengemukakan bahwa, “Konsep adalah abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dan sejumlah karakteristik, kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu”. Jadi peranan konsep dalam penelitian sangat penting karena menghubungkan dunia observasi dengan dunia teori atau antara abstraksi dengan realita. Untuk itu konsep perlu didefinisikan secara tepat sehingga tidak terjadi kesalahan pengukuran.

Berdasarkan paparan tersebut, maka konsep yang dipakai penelitian ini adalah:

1. Kebijakan Publik
2. Pemberdayaan
3. Program
4. Usaha Mikro
5. Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin

### **2.2 Kebijakan Publik**

#### **2.2.1 Pengertian**

Kebijakan publik diartikan sebagai pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang dapat melakukan suatu tindakan kepada masyarakat dan tindakan tersebut merupakan bentuk dari sesuatu yang dipilih oleh pemerintah yang merupakan bentuk dari pengalokasian nilai-nilai kepada masyarakat. Dalam hal ini hanya pemerintah yang mempunyai andil untuk melakukan tindakan kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah publik, sehingga definisi ini juga dapat diklasifikasikan dalam bentuk intervensi pemerintah (dalam Tangkilisan, 2003: 2).

Winarno (2012 : 22), mengkomparasi berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli yang menaruh minat pada bidang kebijakan publik menyimpulkan bahwa, pada dasarnya pandangan mengenai kebijakan publik dapat dibagi kedalam dua wilayah kategori. Pertama, pendapat ahli yang menyamakan kebijakan publik dengan tindakan-tindakan pemerintah. Para ahli dalam kelompok ini cenderung menganggap bahwa semua tindakan pemerintah dapat disebut sebagai kebijakan publik. Pandangan kedua menurut Amir Santoso, berangkat dari para ahli yang memberikan perhatian khusus kepada pelaksanaan kebijakan. Para ahli yang masuk dalam kategori ini terbagi kedalam dua kubu, yakni mereka yang memandang kebijakan publik sebagai keputusan-keputusan pemerintah yang mempunyai tujuan dan maksud-maksud tertentu, dan mereka yang menganggap kebijakan publik sebagai memiliki akibat-akibat yang bisa diramalkan.

### **2.2.2 Karakteristik Kebijakan Publik**

Menurut Agustino (2008) ada beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik :

1. Pada umumnya kebijakan publik perhatiannya ditujukan pada tindakan yang mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau acak.

2. Kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dari pada keputusan yang terpisahpisah, misalnya suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang berkaitan dengan penerapan dan pelaksanaannya.
3. Kebijakan publik merupakan apa yang sesungguhnya yang dikerjakan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, atau menawarkan perumahan rakyat, bukan apa maksud yang dikerjakan atau yang akan dikerjakan. jika legislatif mengeluarkan suatu regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang upah minimum yang telah dikerjakan tapi tidak ada yang yang dikerjakan untuk melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan pada perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak di atur perundang-undangan. ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan apa yang kemudian akan atau dapat terjadi setelah kebijakan itu di implementasikan.
4. Kebijakan publik dapat berbentuk positif maupun negatif. Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam konteks tersebut keterlibatan pemerintah amat diperlukan.
5. Kebijakan publik paling tidak secara positif didasarkan pada hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.

### **2.2.3 Proses Kebijakan Publik**

Berdasarkan berbagai definisi para ahli kebijakan publik, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat

kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan. Berkaitan dengan ini, Dunn (2000:1) mendefinisikan analisis kebijakan sebagai aktifitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Ada beberapa tahap yang harus dilakukan, yaitu penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi/ legitimasi kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Tahaptahap ini dilakukan agar kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuan yang diharapkan.

a. Penyusunan Agenda

b. Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dalam realitas kebijakan publik. Dalam proses inilah memiliki ruang untuk memaknai apa yang disebut sebagai masalah publik dan prioritas dalam agenda publik dipertarungkan. Jika sebuah isu berhasil mendapatkan status sebagai masalah publik, dan mendapatkan prioritas dalam agenda publik, maka isu tersebut berhak mendapatkan alokasi sumber daya publik yang lebih daripada isu lain. Dalam penyusunan agenda juga sangat penting untuk menentukan suatu isu publik yang akan diangkat dalam suatu agenda pemerintah. Isu kebijakan (policy issues) sering disebut juga sebagai masalah kebijakan (policy problem). Isu kebijakan biasanya muncul karena telah terjadi silang pendapat di antara para aktor mengenai arah tindakan yang telah atau akan ditempuh, atau pertentangan pandangan mengenai karakter permasalahan tersebut. Penyusunan agenda kebijakan harus dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan esensi kebijakan, juga keterlibatan stakeholder.

c. Formulasi Kebijakan

Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk dalam agenda kebijakan, dalam tahap

perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah.

d. Adopsi Kebijakan

Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Jika tindakan legitimasi dalam suatu masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warga negara akan mengikuti arahan pemerintah.

e. Implementasi Kebijakan

Dalam tahap implementasi kebijakan akan menemukan dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Disini akan ditemukan apakah kebijakan yang dibuat mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak.

f. Evaluasi Kebijakan

Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan

## 2.3 Pemberdayaan

### 2.3.1 Pengertian pemberdayaan

Sebelum menjelaskan mengenai pemberdayaan, akan lebih baik bila mengetahui terlebih dahulu mengenai kajian administrasi publik. Pada perkembangan administrasi publik, terdapat lima paradigme yang dikembangkan. Menurut Henry (dalam Keban, 2008: 31-33), lima paradigme administrasi adalah sebagai berikut.

1. Paradigma I, dikenal sebagai paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi. Paradigm ini menjelaskan bahwa administrasi harus dilihat sebagai sesuatu yang bebas nilai, dan diarahkan untuk mencapai nilai efisiensi dan ekonomi dari *government bureaucracy*. Sayangnya, dalam paradigma ini hanya ditekankan aspek *locus* saja yaitu *government bureaucracy*, tetapi *focus* atau metode apa yang harus dikembangkan dalam administrasi public kurang dibahas secara jelas dan terperinci.
2. Paradigma II, disebut sebagai paradigam Prinsip-Prinsip Administrasi. Paradigma ini memperkenalkan prinsip-prinsip administrasi sebagai focus administrasi publik. Prinsip-prinsip tersebut dituangkan dalam apa yang disebut sebagai POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting dan Budgeting*) yang menurut mereka dapat diterapkan dimana saja, atau bersifat universal. Sedang locus dari administrasi public tidak pernah diungkapkan secara jelas karena mereka beranggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat berlaku dimana saja termasuk di organisasi pemerintah. Dengan demikian, dalam paradigma ini, focus lebih ditekankan daripada lokusnya.
3. Paradigma III, adalah paradigma Administrasi Negara sebagai ilmu politik. Dijelaskan pada masa tersebut administrasi public mengalami krisis identitas karena ilmu politik dianggap disiplin yang sangat dominan dalam dunia adminstrasi publik.
4. Paradigma IV, adalah Administrasi public sebagai ilmu administrasi. Dalam paradig ini, prinsip-prinsip manajemen yang pernah populer sebelumnya, dikembangkan secara ilmiah dan mendalam. Dua arah perkembangan terjadi dalam perkembangan ini, yaitu berorientasi kepada perkembangan ilmu administrasi murni yang didukung disiplin psikologi social, dan yang berorientasi pada kebijakan public. Semua focus yang dikembangkan disini diasumsikan dapat diterapkan tidak hanya dalam dunia bisnis tetapi juga dalam dunia administrasi public. Karena itu, fokusnya menjadi tidak jelas.
5. Paradigma V, merupakan paradigma terakhir yang disebut sebagai Administrasi Publik sebagai Administrasi public. Paradigma ini telah memiliki focus dan lokus

yang jelas. Focus administrasi public dalam paradigma ini adalah teori organisasi, teori manajemen, dan kebijakan public. Sedangkan lokusnya adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan public.

Berdasarkan penjelasan perkembangan paradigma dalam administrasi public tersebut, maka terlihat jelas bahwa pemberdayaan termasuk dalam paradigma V yaitu paradigma administrasi public, dimana lokus dalam paradigma ini adalah masalah-masalah dan kepentingan-kepentingan public. Masalah public dapat terjadi apabila masyarakat belum atau tidak berdaya. Ketidakberdayaan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup pada akhirnya dapat menjerumuskan mereka pada masalah public seperti kemiskinan. Sennet *et al.* (dalam Suharto, 2005:61) menyatakan,

“ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa factor seperti: ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan financial, ketiadaan elatihan-pelatihan, adanya ketegangan fisik maupun emosional”.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dibutuhkan peran pemerintah untuk mengatasi permasalahan public salah satunya yaitu melalui kegiatan pemberdayaan.

Suharto (2005:54) menyatakan bahwa pemberdayaan dapat dilihat sebagai sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam mengerjakan tugas-tugas kehidupannya.

Proses pemberdayaan sangat tergantung pada dua hal: (1) bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika kekuasaan tidak dapat berubah maka pemberdayaan pun tidak dapat terjadi dengan cara apapun. (2) bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep ini

menekankan pada pengertian kekuasaan yang tidak statis, melainkan dinamis. Tujuan utama pemberdayaan adalah memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya kelompok lemah yang memiliki ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal (misalnya persepsi mereka sendiri) maupun kondisi eksternal (misalnya ditindas struktur sosial yang tidak adil).

Ada beberapa prinsip pemberdayaan menurut perspektif pekerjaan sosial (Suharto, 2005:24) yaitu: (1) pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Karena pekerjaan sosial dan masyarakat harus bekerjasama sebagai partner. (2) proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan. (3) masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan. (4) kompetensi diperoleh atau dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat. (5) solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut. (6) jaringan-jaringan sosial informal merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan mengendalikan seseorang. (7) masyarakat harus berpartisipasi dalam memberdayakan mereka sendiri berupa tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri. (8) tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan. (9) pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif. (10) proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, berubah terus, evolutif, permasalahan selalu memiliki beragam solusi. (11) pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal dan pembangunan ekonomi secara paralel.

Menurut Suharto (2005:27), ada dua pendekatan pekerjaan sosial dalam melihat kemiskinan yang satu sama lain saling terkait, yaitu: pertama, melihat

penyebab kemiskinan dan sumber-sumber penyelesaian kemiskinan dalam kaitannya dengan lingkungan dimana miskin tinggal, baik dalam konteks keluarga, kelompok pertemanan (*peer group*), maupun masyarakat. Penanganan kemiskinan yang sifatnya kelembagaan biasanya didasari oleh pendekatan ini. Kedua, melihat si miskin dalam konteks situasinya, strategi pekerjaan sosial berpijak pada prinsip-prinsip *individualisation* dan *self-determinism* yang melihat miskin secara individual yang memiliki masalah dan kemampuan unik.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan di atas dicapai melalui penerapan pendekatan yang disingkat menjadi 5P, yaitu: pemungkinan, penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan (Suharto, 2005:30):

- a. Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- b. Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
- c. Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- d. Penyokongan: memberikan dukungan dan sokongan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi

yang semakin lemah dan terpingirkan.

- e. Pemeliharaan: memelihara kondisi kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang mungkin setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan merupakan tindakan untuk membantu pihak yang lemah menjadi lebih berdaya dengan cara meningkatkan kemampuan, kekuasaan, hingga keterampilan mereka agar menjadi lebih mandiri dan sanggup menentukan sikap. Dalam hal ini, agar mereka mampu mengambil keputusan serta tindakan dalam menghadapi hambatan baik dari diri mereka maupun dari luar yang mengganggu dan menghambat mereka dalam upaya melepaskan diri dari masalah-masalah seperti kemiskinan yang mereka alami.

### 2.3.2 Tujuan Pemberdayaan

Berkaitan dengan penjelasan penerapan pendekatan atau 5P, yang pada intinya pemberdayaan bertujuan untuk membentuk kemandirian. Dimana pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan, akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian. Hal ini sesuai dengan Sulistiyani (2004:80) menjelaskan,

“tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut...ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi....”.

Selain itu, mengenai kemandirian juga dijelaskan pada Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1 Huruf e yang menerangkan bahwa,

“kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri sendiri, tanpa bergantung pada pihak lain yang dilandasi kepercayaan terhadap pertimbangan, keputusan, kemampuan dan usaha sendiri. Dalam kemandirian terkadang terkandung pula pengertian kebebasan yang bertanggungjawab, otonomi, swadaya, berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri, dan kehendak untuk mengelola sendiri”.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan bertujuan untuk membentuk kemandirian pada masyarakat yang berkecukupan kemampuan yang dilengkapi dengan kecakapan-keterampilan yang memadai, diperkuat oleh rasa memerlukan pembangunan dan perilaku sadar akan kebutuhannya tersebut. Dengan demikian akan terakumulasi kemampuan yang memadai, untuk mengantarkan kemandirian pada masyarakat.

### 2.3.3 Tahap-tahap Pemberdayaan

Dalam rangka menjaga kemandirian tersebut tetap dilakukan pemeliharaan semangat, kondisi, dan kemampuan secara terus menerus supaya tidak mengalami kemunduran lagi. Oleh karena dalam pemberdayaan akan berlangsung secara bertahap. Menurut Sulistiyani (2008:83), tahap-tahap yang harus dilalui tersebut adalah meliputi sebagai berikut.

1. Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. Pada tahap ini, pihak pemberdaya/aktor/pelaku pemberdayaan berusaha menciptakan prakondisi, supaya dapat memfasilitasi berlangsungnya proses pemberdayaan yang efektif.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. Pada tahap ini, masyarakat hanya dapat memberikan peran partisipasi pada tingkat yang rendah, yaitu sekedar menjadi pengikut atau objek pembangunan saja, belum mampu menjadi subjek dalam pembangunan.

3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian. Kemandirian tersebut akan ditandai oleh kemampuan masyarakat di dalam membentik inisiatif, melahirkan kreasi-kreasi, dan melakukan inovasi-inovasi di dalam lingkungannya.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami bahwa pemberdayaan berlangsung secara bertahap dalam membentuk kemandirian agar dapat terpupuk dan terpelihara dengan baik serta dengan kemandirian yang dimiliki dapat melakukan dan mengambil tindakan nyata dalam pembangunan.

#### 2.3.4 Indikator Keberdayaan

Suharto (2005:28) menyatakan bahwa keberhasilan pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari keberdayaan mereka yang menyangkut kemampuan ekonomi, kemampuan mengakses manfaat kesejahteraan dan kemampuan kultural dan politis. Ketiga aspek tersebut dikaitkan dengan empat dimensi kekuasaan, yaitu: kekuasaan di dalam (*power within*), kekuasaan untuk (*power to*), kekuasaan atas (*power over*) dan kekuasaan dengan (*power with*). Indikator keberdayaan menurut Soeharto (2005:65) dapat dilihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut.

Tabel 2.1 Indikator Keberdayaan

Jenis Hubungan Kekuasaan	Kemampuan Ekonomi	Kemampuan Mengakses Manfaat Kesejahteraan	Kemampuan Kultural dan Politis
<p><b>Kekuasaan di dalam:</b> Meningkatkan kesadaran dan keinginan untuk berubah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Evaluasi positif terhadap kontribusi ekonomi dirinya.</li> <li><input type="checkbox"/> Keinginan memiliki kesempatan ekonomi yang setara.</li> <li><input type="checkbox"/> Keinginan memiliki kesamaan hak terhadap sumber yang ada pada rumah tangga dan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kepercayaan diri dan kebahagiaan.</li> <li><input type="checkbox"/> Keinginan memiliki kesejahteraan yang setara.</li> <li><input type="checkbox"/> Keinginan membuat keputusan mengenai diri dan orang lain.</li> <li><input type="checkbox"/> Keinginan untuk mengontrol jumlah anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> <i>Assertiveness</i> dan otonomi.</li> <li><input type="checkbox"/> Keinginan untuk menghadapi subordinasi gender termasuk tradisi budaya, diskriminasi hukum dan pengucilan politik.</li> <li><input type="checkbox"/> Keinginan terlibat dalam proses- proses budaya, hukum dan politik.</li> </ul>
<p><b>Kekuasaan untuk:</b> Meningkatkan kemampuan individu untuk berubah, Meningkatkan kesempatan untuk memperoleh akses.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Akses terhadap pelayanan keuangan mikro.</li> <li><input type="checkbox"/> Akses terhadap pendapatan.</li> <li><input type="checkbox"/> Akses terhadap aset- aset produktif dan kepemilikan rumah tangga.</li> <li><input type="checkbox"/> Akses terhadap pasar.</li> <li><input type="checkbox"/> Penurunan beban dalam pekerjaan domestik, termasuk perawatan anak.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Keterampilan, termasuk kemelekan hurup</li> <li><input type="checkbox"/> Status kesehatan dan gizi</li> <li><input type="checkbox"/> Kesadaran mengenai dan akses terhadap pelayanan kesehatan reproduksi</li> <li><input type="checkbox"/> Kesediaan pelayanan kesejahteraan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Mobilitas dan akses terhadap dunia di luar rumah</li> <li><input type="checkbox"/> Pengetahuan mengenai proses hukum, politik dan kebudayaan</li> <li><input type="checkbox"/> Kemampuan menghilangkan hambatan formal yang merintangi akses terhadap proses hukum, politik, dan kebudayaan.</li> </ul>

<p><b>Kekuasaan atas:</b> Perubahan pada hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga, masyarakat dan makro; Kekuasaan atau tindakan individu untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kontrol atas penggunaan pinjaman dan tabungan serta keuntungan yang dihasilkannya.</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrol atas pendapatan aktivitas produktif keluarga yang lainnya.</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrol atas aset produktif dan kepemilikan keluarga.</li> <li><input type="checkbox"/> Kontrol atas alokasi tenaga kerja keluarga.               <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Tindakan individu menghadapi diskriminasi atas akses terhadap sumber dan pasar.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Kontrol atas ukuran konsumsi keluarga dan aspek bernilai lainnya dari pembuatan keputusan keluarga termasuk keputusan keluarga berencana.</li> <li><input type="checkbox"/> Aksi individu untuk mempertahankan diri dari kekerasan keluarga dan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Aksi individu dalam menghadapi dan mengubah persepsi budaya kapasitas dan hak wanita pada tingkat keluarga dan masyarakat.</li> <li><input type="checkbox"/> Keterlibatan individu dan pengambilan peran dalam proses budaya, hukum dan politik.</li> </ul>
<p><b>Kekuasaan dengan:</b> Meningkatnya solidaritas atau tindakan bersama dengan orang lain untuk menghadapi hambatan-hambatan sumber dan kekuasaan pada tingkat rumah tangga masyarakat dan makro</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Bertindak sebagai model peranan bagi orang lain terutama dalam pekerjaan publik dan modern.</li> <li><input type="checkbox"/> Mampu memberi gaji terhadap orang lain.</li> <li><input type="checkbox"/> Tindakan bersama menghadapi diskriminasi pada akses terhadap sumber (termasuk hak atas tanah), pasar dan diskriminasi gender pada konteks ekonomi makro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Penghargaan tinggi terhadap dan peningkatan pengeluaran untuk anggota keluarga.</li> <li><input type="checkbox"/> Tindakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan publik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Peningkatan jaringan untuk memperoleh dukungan pada saat krisis.</li> <li><input type="checkbox"/> Tindakan bersama untuk membela orang lain menghadapi perlakuan salah dalam keluarga dan masyarakat.</li> <li><input type="checkbox"/> Partisipasi dalam gerakan-gerakan menghadapi subordinasi gender yang bersifat kultural, politis, hukum pada tingkat masyarakat dan makro.</li> </ul>

Sumber: Suharto, (2005: 65)

### 2.3.5 Model-model Pemberdayaan

Jika kita berbicara tentang model, model dapat membantu sebuah penelitian untuk memahami hal yang sebelumnya tidak diketahui. “....kita tidak memiliki jalan pikiran [sic] tentang sesuatu yang tidak kita kenal kecuali apabila dia di kaitkan dengan model”(Riggs, 1988:6).

Terdapat beberapa model yang umumnya digunakan dalam pemberdayaan, dan pada penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran bagaimana model-model pemberdayaan yang ada. Model-model pemberdayaan tersebut antara lain sebagai berikut.

a. Model Kemitraan

Kemitraan dilihat dari perspektif etimologi diadaptasi dari kata *partnership*, dan berasal dari kata *patner*, *patner* dapat diterjemahkan “pasangan, jodoh, sekutu atau kompayon. Sedangkan *partnership* diterjemahkan menjadi persekutuan atau perkongsian” (Sulistiyani, 2004:129-130). Berdasarkan dari pengertian tersebut di atas, maka kemitraan dapat terbentuk apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut.

1. Ada dua pihak atau lebih.
2. Memiliki kesamaan visi dalam mencapai tujuan.
3. Ada kesepakatan.
4. Saling membutuhkan.

Kemitraan dapat dilakukan oleh pihak-pihak perseorangan maupun badan hukum atau kelompok-kelompok. Adapun macam model kemitraan adalah menurut Sulistiyani (2004: 130) adalah sebagai berikut.

1. Kemitraan semu (*preudo partnership*)

Adalah merupakan sebuah persekutuan yang terjadi antara dua pihak atau lebih, namun tidak sesungguhnya melakukan kerjasama secara seimbang satu dengan lainnya. Bahwa pada suatu pihak belum tentu memahami benar akan makna sebuah persekutuan yang dilakukan, dan untuk apa semua itu dilakukan serta disepakati. Sebagai contoh slogan “pembangunan dari oleh pemerintah untuk rakyat” pada jaman orde baru. Rakyat yang berposisi sebagai mitra kerja pemerintah sesungguhnya tidak mengetahui apa makna semua itu, walaupun mereka yakin bahwa itu sangat penting.

2. Kemitraan mutualistik, atau (*mutualism partnership*).

Kemitraan ini merupakan persekutuan dua pihak atau lebih yang sama-sama menyadari aspek pentingnya melakukan kemitraan yaitu untuk saling memberi manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga

memudahkan masing-masing dalam mewujudkan visi dan misinya, dan sekaligus saling menunjang satu sama lain.

3. Kemitraan melalui peleburan dan pengembangan (conjugation partnership)

Organisasi, agen-agen, kelompok-kelompok atau perorangan yang memiliki kelemahan di dalam melakukan usaha atau mencapai tujuan organisasi dapat melakukan kemitraan dengan model ini. Dalam model kemitraan terbagi lagi atas dua jenis, yang pertama penggabungan secara ara subordinatif atau subordinate union of partnership yaitu kemitraan antara dua pihak atau lebih yang memiliki status, kemampuan atau kekuatan tidak seimbang satu sama lain atau tidak dalam satu garis lurus. Oleh karena kondisi demikian ini mengakibatkan tidak ada sharing dan perang atau fungsi penggabungan pihak-pihak secara garis lurus. Pihak yang bergabung untuk melakukan kerjasama adalah organisasi atau pihak yang memiliki persamaan secara relatif. Yang menjadi tekanan utama adalah visi dan misi yang saling mengisi satu dengan lainnya.

b. Model Pembangunan Berpusat Pada Manusia atau People Centre Development

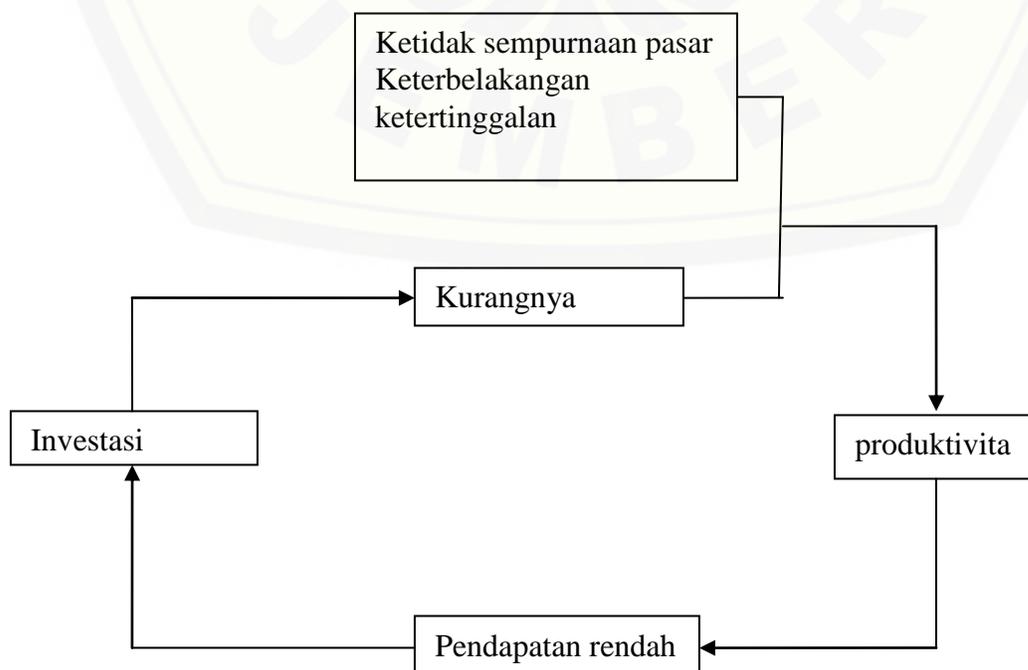
Dalam konsep pembangunan yang berpusat pada manusia terhadap tiga dasar pemikiran yaitu: (1) memusatkan pikiran dan tindakan kebijakan pemerintah pada penciptaan keadaan yang mendorong dan mendukung usaha rakyat untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan untuk memecahkan masalah mereka pada tingkatan individual. Keluarga, dan komunitas; (2) mengembangkan struktur organisasi yang berfungsi menurut kaidah sistem yang swaorganisasi [sic]; (3) mengembangkan sistem produksi konsumsi yang diorganisir secara teritorial yang berlandaskan pada kaidah pemilihan dan pengendalian lokasi (Korten dalam Sujono dan Nugroho,2008:22). Pembangunan yang berpusat pada

manusia (people centered development), yaitu pada upaya meningkat taraf hidup masyarakat dengan memfokuskan pada pemberdayaan dan pembangunan manusia itu sendiri, (Adi 2008:66-67). Sejalan dengan pendapat tersebut Sujono dan Nugroho (2008:337) berpendapat dalam,

“model people centre development menitik beratkan pada pembangunan kualitas manusia sebagai upaya untuk memengaruhi [sic] dan mengatur masa depannya. Model ini mencoba mengakat martabat manusia sebagai mana mestinya sebagai makhluk yang memiliki harga diri, memiliki kemampuan intelegensi, sekaligus memiliki perasaan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, model ini dimasukkan sebagai upaya pemberdayaan dan membantu masyarakat keluar dari perangkap kemiskinan sebagaimana yang di jelaskan oleh Nurkse (dalam Surjono dan Nugroho, 2008:338) pada gambar berikut:

Gambar 2.1 Lingkaran setan kemiskinan



Sumber:Nurkse(dalam Sujono dan Nugroho,2008:338)

Lingkaran setan kemiskinan diawali, dari ketidaksempurnaan pasar, keterbelakangan, ketertinggalan yang mengakibatkan produktivitas masyarakat yang rendah. Rendahnya produktivitas dapat menyebabkan pendapatan masyarakat rendah sehingga masyarakat belum mampu untuk berinvestasi. Investasi yang rendah dapat berakibat pada modal yang rendah dan seterusnya serta tiada putusnya. Oleh sebab itu dalam rangka mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan upaya pemberdayaan yang diarahkan untuk dapat memotong lingkaran kemiskinan tersebut.

c. Model Grameen Bank

Pemberdayaan memang memiliki tujuan yang mulia, namun pelaksanaannya tentu tidak mudah. Model Grameen Bank merupakan sebuah unit bank yang memiliki area pelayanan keuangan 15 sampai 20 desa. Hal yang menjadikan model ini unik adalah manajer dan karyawan bank yang terjun langsung ke masyarakat untuk menjelaskan dan memperkenalkan program bank pada masyarakat. Grameen Bank menekankan pada sistem kredit yang dianggap ampuh dalam mengatasi kemiskinan serta mampu menimbulkan kegiatan sosial ekonomi yang efektif. Sujono dan Nugroho(2008:34) menjelaskan bahwa,

“metodologi Grameen Bank tidak berbasis pada penilaian kepemilikan seseorang, tetapi berbasis pada potensi dari orang tersebut. Grameen Bank percaya bahwa setiap manusia termasuk yang miskin sekalipun dibekali dengan potensi yang banyak.

Meskipun demikian Grameen Bank tetap berusaha mendapatkan keuntungan agar operasional bank tidak terhenti.”

Grameen Bank mempunyai banyak cabang yang tersebar hingga pelosok-pelosok desa agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses sumber keuangan dengan prosedur yang mudah. Pada model ini tidak ada proses hukum yang diterapkan apabila si peminjam kesulitan dalam mengembalikan pinjaman sebagai bank-bank konvensional yang akan membawa nasabahnya ke pengadilan bila kredit macet. Grameen Bank akan bekerja keras dalam menolong pinjaman untuk mendapatkan kekuatan serta kepercayaan diri dalam mengatasi persoalan yang dihadapi.

#### **2.4 Konsep Program**

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain :

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui.
- d. Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- e. Adanya strategi dalam pelaksanaan (Manila, 1996 : 43).

Selanjutnya Jones (1991 : 35), menyebutkan: Apakah program efektif atau tidak, maka standar penilaian yang dapat dipakai adalah organisasi, interpretasi, penerapan. Ketiga standar penilaian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Organisasi

Maksudnya disini ialah organisasi pelaksanaan program. Selanjutnya organisasi tersebut harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas. Struktur organisasi yang kompleks, struktur ditetapkan sejak semula dengan desain dari berbagai komponen atau subsistem yang ada tersebut

Sumber daya manusia yang berkualitas berkaitan dengan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Aparatur dalam hal ini petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program. Tugas aparat pelaksana program yang utama adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang dipercayakan kepadanya untuk mencapai tujuan negara. Agar tugas-tugas pelaksana program dapat dilaksanakan secara efektif maka setiap aparatur dituntut memiliki kemampuan yang memadai sesuai dengan bidang tugasnya.

## 2) Interpretasi

Maksudnya disini agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

### a) Sesuai Dengan Peraturan

Sesuai dengan peraturan berarti setiap pelaksanaan kebijaksanaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku baik Peraturan Tingkat Pusat, Propinsi, Kabupaten.

### b) Sesuai Dengan Petunjuk Pelaksana

Sesuai dengan petunjuk pelaksana berarti pelaksanaan kebijaksanaan dari peraturan sudah dijabarkan cara pelaksanaannya pada kebijaksanaan yang bersifat administratif, sehingga memudahkan pelaksana dalam melakukan aktifitas pelaksanaan program.

c) Sesuai Petunjuk Teknis

Sesuai dengan petunjuk teknis berarti kebijaksanaan yang sudah dirumuskan dalam bentuk petunjuk pelaksana dirancang lagi secara teknis agar memudahkan dalam operasionalisasi program. Petunjuk teknis ini bersifat strategis lapangan agar dapat berjalan efisien dan efektif, rasional dan realistis.

3) Penerapan

Maksudnya disini peraturan/kebijakan berupa petunjuk pelaksana dan teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat ini harus dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan yang disiplin.

a) Prosedur kerja yang jelas

Prosedur kerja yang sudah ada harus memiliki prosedur kerja agar dalam paelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih, sehingga tidak bertentangan antara unit kegiatan yang terdapat di dalamnya.

b) Program kerja

Program kerja harus sudah terprogram dan terencana dengan baik, sehingga tujuan program dapat irealisasikan dengan efektif.

c) Jadwal kegiatan

Program yang sudah ada harus dijadwalkan kapan dimulai dan diakhiri suatu program agar mudah dalam mengadakan evaluasi. Dalam hal ini yang diperlukan adanya tanggal pelaksanaan dan rampungnya sebuah program sudah ditentukan sebelumnya.

## 2.5 Usaha Mikro

Seperti yang dijelaskan diatas mengenai tujuan pemberdayaan, maka tujuan spesifik dari pemberdayaan usaha mikro menurut Peraturan Daerah Propinsi Jawa

Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (2007:5) adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi usaha mikro, kecil, dan menengah.
- b. Meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah
- c. Meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif
- d. Meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, professional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada *[sic]* sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

Karakteristik usaha mikro secara umum adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat informal dan tidak berbadan hukum.
- b. Bersifat fluktuatif baik dari segi omzet maupun tenaga kerja.
- c. Tanpa atau hanya menggunakan teknologi sederhana. Teknologi yang termasuk tinggi yang digunakan dalam usaha mikro antara lain mesin jahit dan mesin bubut logam.
- d. Pelaku usaha mikro relatif mudah berganti jenis usaha. Keluar masuknya usaha mikro relatif mudah karena usaha ini tidak memerlukan perijinan formal, modal usaha yang dibutuhkan relatif kecil, serta tidak memerlukan keahlian khusus khusus

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar suatu usaha dapat digolongkan sebagai usaha mikro apabila usaha tersebut bersifat informal, modal yang digunakan terbatas, tidak memerlukan keterampilan dan keahlian khusus serta teknologi yang dipergunakan masih sederhana. Usaha mikro

yang dimaksud ini adalah usaha mikro yang diperuntukkan untuk rumah tangga miskin. Usaha mikro RTM (Rumah Tangga Miskin) adalah

“usaha perseorangan dan atau usaha kelompok yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang bergerak disektor [*sic*] perdagangan dan jasa serta usaha produktif lainnya, yang tergabung dalam Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM)” (Pemerintah Kabupaten Jember, 2007:9).

Sedangkan penyaluran dana bergulir modal usaha mikro dijelaskan dalam proses awal untuk 13 tahap penguatan institusi antara lain (1) identifikasi tokoh relawan; (2) pembekalan tokoh relawan; (3) identifikasi calon Pokmas; (4) pembentukan dan pembekalan Pokmas; (5) Rembuk Pokmas 1 tentang refleksi kemiskinan; (6) Rembuk Pokmas tentang pemetaan Swadaya; (7) Pembekalan Pokmas tentang peluang usaha mikro; (8) Rembug Pokmas 3 tentang pembentukan LKMM; (9) pembekalan tehnik LKMM; (10) Pembekalan Pokmas tentang tehnik Tanggung Renteng; (11) Pembekalan Pokmas tentang manajemen usaha dan ekonomi; (12) Pembekalan Pokmas tentang Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK); dan (13) Rembuk Pokmas 4 tentang Pengelolaan Bantuan Modal. Setelah itu ada bantuan usaha yang berasal dari APBD yang disalurkan dengan bentuk LKMM yang kemudian dibentuk Pokmas (RTM) dan kemudian dikembangkan Pokmas dan RTM baru (Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Jember, 2005:4-5).

Jenis usaha mikro yang dibiayai dalam Program PUM-RTM adalah sebagai berikut.

- a. Bidang perdagangan (*trading*) skala kecil
  - 1) pertokoan/pracangan kebutuhan pokok keluarga
  - 2) perdagangan hasil bumi (palawija dan buah-buahan)
  - 3) bahan baku bahan bangunan
  - 4) mlijo/pedagang keliling
  - 5) konveksi dan alat-alat kecantikan

- 6) dan lain-lain
- b. Produksi/industry rumah tangga
  - 1) tahu, tempe, tape, roti/panganan kecil (kue-kue), krupuk, jamu, dan obat-obatan tradisional
  - 2) pakaian jadi
  - 3) dan lain-lain (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2005:5).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa usaha mikro RTM ini dikhususkan pada program pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin (PUM-RTM) yang merupakan program pengentasan kemiskinan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat.

## **2.6 Program Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM)**

Program PUM-RTM merupakan program pengentasan kemiskinan melalui pendekatan ekonomi yang berbasis pada penguatan institusi. Program yang digagas Dinas Koperasi UMKM ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Jember Nomor: 518/1156/463.313/2005 tentang petunjuk teknis Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2005:2).

Kegiatan PUM-RTM akan bermuara pada terbentuknya 2 institusi yaitu institusi sosial yang bernama pokmas (kelompok masyarakat) dan institusi ekonomi yang bernama LKMM (Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat). Institusi social yang bernama Pokmas ini, penjelasannya sebagai berikut.

“Pokmas-RTM atau kelompok Rumah Tangga Miskin adalah kelompok masyarakat yang dibentuk dalam menanggulangi kemiskinan dengan cara bekerja sama dalam kelompok dan menguatkan anggota kelompok, beranggotakan maksimal 5 (lima) orang ibu-ibu rumah tangga miskin dalam suatu wilayah tertentu berdomisili berdekatan dengan antar anggota yang satu dengan anggota lainnya” (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2005:14)

Tujuan dari kegiatan pembentukan Pokmas adalah sebagai berikut.

- a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya capital social
- b. Mendorong warga masyarakat untuk dapat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan.
- c. Mendorong proses pemberdayaan berjalan secara efektif dan efisien
- d. Mendukung terjadinya proses saling asah-saling asuh antar sesama anggota
- e. Terjadinya konsolidasi kekuatan bersama baik antar yang lemah maupun antar yang kuat dan lemah di dalam satu Pokmas (konsep sapu lidi).
- f. Mengembangkan dan melembagakan tanggung renteng, membangun jaminan karakter antar anggota, wadah roses belajar/interaksi antar anggota, menggerakkan keswadayaan dan modal, meningkatkan dan menertibkan angsuran pinjaman, menguatkan dan mengembangkan usaha anggota, dll [sic] (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2007:24-25).

Kemudian yang kedua adalah institusi ekonomi yang bernama Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM) adalah lembaga keuangan informal pra koperasi yang mengelola simpan pinjam yang melayani pengusaha mikro perempuan dari keluarga miskin dengan pola tanggung renteng (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2010:37). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa LKMM merupakan lembaga keuangan yang mengelola dan menyediakan dana bagi para anggota Pokmas yang terdaftar yang membutuhkan dan mengakses permodalan di tempat tersebut.

Program PUM-RTM ini merupakan program pengentasan kemiskinan yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat. Program ini juga mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas. Tujuan spesifik dari Program PUM-RTM ini adalah sebagai berikut.

- a. Meningkatkan kapasitas usaha dan pendapatan Rumah Tangga Miskin (RTM).
- b. Menyediakan sumber permodalan untuk pengembangan usaha mikro.
- c. Mewujudkan kemandirian dan kapabilitas komunitas dalam menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
- d. Memfasilitasi terbentuknya institusi ekonomi yang bernama LKMM (Lembaga Keuangan Mikro Rumah Tangga Miskin) atau Bank Gakin [*sic*] serta terbentuknya institusi social (Pokmas) (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2008:7).

Sedangkan sasaran program PUM-RTM ini adalah sebagai berikut.

- a. Lokasi PUM-RTM diprioritaskan pada desa /kelurahan dengan jumlah penduduk miskin yang relative tinggi termasuk juga wilayah yang terkena bencana.
- b. Wilayah pelayanan LKMM dan pembentukan Pokmas diprioritaskan pada lingkup dusun/lingkungan
- c. Sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM) diprioritaskan pada RTM usia produktif, perempuan, menikah, dan telah memiliki usaha atau pernah berusaha dan berencana membuka usaha baru atau RTM yang belum berpengalaman usaha tetapi memiliki motivasi tinggi untuk merintis usaha (Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember, 2008:7).

The background of the page features a large, faint watermark of the Universitas Jember logo. The logo is a shield-shaped emblem with a yellow and green color scheme. It contains the word "UNIVERSITAS" in a large, bold, sans-serif font at the top. Below the text is a stylized graphic of a tree or plant with a central stem and several branches, each ending in a circular shape. The entire logo is rendered in a light, semi-transparent grey color.

### **BAB 3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dalam memecahkan suatu masalah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan menggunakan metode penelitian diharapkan peneliti dapat memperoleh data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, metode penelitian mempunyai peranan penting dalam tercapainya penelitian.

Metode penelitian digunakan untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengalaman. Sesuai yang dikemukakan oleh Sugiyono (2002:1) “Metode penelitian adalah cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan data tersebut dapat dibuktikan dan dikembangkan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.”

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
2. Fokus Penelitian
3. Lokasi Penelitian
4. Jenis dan Sumber Data
5. Teknik Penentuan Informan
6. Teknik Pengumpulan Data
7. Metode Analisis Data
8. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

### 3.1 Jenis Penelitian

Menurut buku Pedoman Penelitian Karya Ilmiah (2012:22). “Jenis penelitian merupakan penegasan tentang kategori penelitian yang akan dilakukan”. Berdasarkan jenis data, dibedakan atas penelitian kualitatif dan atau penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif. Moleong (2005:6) menjelaskan bahwa,

“penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll [*sic*]..., dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, ada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode ilmiah”.

Menurut Moleong (2005:11), ciri penelitian kualitatif deskriptif adalah sebagai berikut,

“data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal ini disebabkan oleh adanya penerangan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti”.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan mengenai pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin di desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

### 3.2 Fokus Penelitian

Spradley (dalam Sugiyono, 2011:208) menyatakan bahwa “*A focused refer to a single cultural domain or a few related domains*”, maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Spradley (dalam Sugiyono, 2011:209) juga mengemukakan empat alternatif untuk menetapkan fokus,yaitu:

“(1) menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan; (2) menetapkan fokus berdasarkan domain-domain tertentu organizing domain; (3) menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan iptek; (4) menetapkan fokus berdasarkan permasalahan yang terkait dengan teori-teori yang telah ada”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penetapan fokus penelitian ini yang terkait dengan permasalahan yang ada. Oleh karena itu, penetapan fokus yang dilakukan peneliti akan difokuskan kepada tahap bantuan perberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin, dimana merupakan proses pemberdayaan untuk masyarakat miskin golongan pengusaha mikro pada program pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin (PUM-RTM) di desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

### **3.3 Penentuan Lokasi penelitian**

Lokasi penelitian yaitu tempat peneliti untuk mendapatkan informasi serta data yang diperlukan untuk memperoleh jawaban dari masalah yang diangkat. Penentuan Lokasi penelitian dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji lebih mendalam. Hal ini penting karena betapa pun menariknya suatu kasus, tetapi jika sulit dimasuki lebih dalam oleh seorang peneliti, maka akan menjadi suatu kerja yang sia-sia (Yuswadi dalam Bungin, 2006:136).

Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember. Peneliti tertarik melakukan penelitian di desa Sucopangepok, Kecamatan Jelbuk karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM, pada lokasi tersebut jumlah LKMM yang mana sebagai institusi ekonomi dalam pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin di desa tersebut masih ada yang mengalami kerugian dan macet. Hal ini menjadikan salah satu penyebab mengapa desa Sucopangepok menjadi desa yang belum lepas dari masalah kemiskinan.

### **3.4 Sumber dan Jenis Data**

Menurut Lofland dan Lofland (dalam Moleong, 2005:157), “sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka sumber data utama dalam penelitian ini bersumber dari informan baik melalui wawancara maupun observasi. Selanjutnya, sumber data pendukung dalam penelitian ini adalah dokumen yang berupa sumber tertulis, foto, data statistik, dan melalui studi kepustakaan. Sumber data tertulis yang digunakan adalah sumber dari arsip dan dokumen resmi. Sumber data yang berupa foto juga digunakan dalam penelitian ini karena sebagai pendorong dan memberikan gambaran yang menghasilkan data.

Adapun data statistic juga bermanfaat dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran terhadap suatu kondisi atau keadaan.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sugiyono (2011:225) menyatakan, “sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data ...”. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari para informan melalui wawancara dan hasil observasi. Adapun informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak pemberdaya meliputi para staf koperasi yang terlibat dalam program PUM-RTM di desa Sucopangepok, dan pihak yang diberdayakan meliputi pengurus LKMM dan anggota Pokmas di desa Sucopangepok. Kemudian jenis data yang selanjutnya adalah data sekunder. Menurut Sugiyono (2011:225) bahwa “... sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan, sumber tertulis, foto dan data statistik.

### **3.5 Teknik Penentuan informan**

Penentuan informan sangat dibutuhkan dalam suatu penelitian dalam rangka memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Informan harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian. Ia berkewajiban secara sukarela menjadi anggota tim peneliti walaupun hanya bersifat informal. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu,

melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut.

Sanafiah Faisal dengan mengutip pendapat Spradley (dalam Sugiyono, 2008:221) mengemukakan bahwa,

”situasi sosial untuk sampel awal sangat disarankan suatu situasi sosial yang didalamnya menjadi semacam muara dari banyak domain lainnya. Selanjutnya dinyatakan bahwa, sampel sebagai sumber data atau sebagai informan sebaiknya memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayati
2. Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti
3. Mereka mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi
4. Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil kemasannya sendiri
5. Mereka yang pada mulanya tergolong cukup asing dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.”

Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2011:216). Untuk usaha menemukan informan dapat dilakukan dengan cara:

1. melalui keterangan orang berwenang, baik secara formal (pemerintah) maupun secara informal (pimpinan masyarakat seperti tokoh masyarakat, pimpinan adat dll),
2. melalui wawancara pendahuluan yang dilakukan oleh peneliti.

Informan yang dipilih antara lain yaitu

1. Bapak Mirfano selaku Kepala Dinas Koperasi UMKM
2. Bapak Agus Edi Susanto selaku Kasi Usaha Mikro Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember
3. Fasilitator dan Supervisor LKMM di desa Sucopangepok
4. Anggota Pokmas di desa Sucopangepok

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data itu terkait dengan cara peneliti dalam mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Adapun rinciannya adalah sbagai berikut.

#### 3.6.1 Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (dalam Sugiyono, 2011: 145) mengemukakan bahwa “observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantaranya yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan”. Adapun penelitian ini menggunakan observasi partisipatif pasif. Menurut Sugiyono (2011:227) bahwa,

“partisipasi pasif (*passive participation*): means the research is present at the scene of action but does not interact or participate. Jadi dalam hal ini peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut”.

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang ditemukan di lapangan antara pihak yang memberdayakan dan pihak yang diberdayakan yaitu sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Berdasarkan observasi tersebut diperoleh gambaran mengenai pemberdayaan usaha mikro rumah tangga miskin di desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember.

#### 3.6.2 Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini peneliti akan melakukan Tanya jawab yang dilakukan berdasar tujuan penelitian. Peneliti dalam hal ini akan bertindak sebagai pewawancara yang akan mengajukan pertanyaan kepada informan untuk memperoleh informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

Koentjaraningrat (dalam Bungin, 2001:62) membagi wawancara ke dalam dua hal golongan besar, ialah wawancara berencana atau *standardized interview* dan wawancara tak berencana atau *unstandardized interview*. Perbedaan terletak pada perlu tidaknya peneliti menyusun daftar pertanyaan yang dipergunakan sebagai pedoman untuk mewawancarai informan. Sedangkan dipandang dari sudut bentuk pertanyaannya, wawancara dapat dibedakan antara lain yaitu wawancara tertutup atau *closed interview* dan wawancara terbuka atau *open interview*. Perbedaan terletak pada jawaban yang dikehendaki tidak terbatas maka wawancara tersebut tertutup, sedangkan apabila jawabannya dikehendaki tidak terbatas maka termasuk wawancara terbuka.

Dalam pengumpulan data di lapangan, peneliti akan menggunakan metode wawancara mendalam yang bersifat terbuka, dimana peneliti akan mengumpulkan informasi dengan langsung bertatap muka dengan informan untuk mendapatkan gambaran secara lengkap sesuai dengan topik yang diteliti. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data melalui wawancara yaitu bolpoin sebagai alat menulis serta mencatat dalam media berupa kertas, selanjutnya yaitu alat perekam (*recorder*) dalam bentuk *handphone*.

### 3.6.3 Dokumentasi

Pengumpulan data yang berbentuk dokumentasi bertujuan untuk menambah data atau dapat dikatakan sebagai pendukung data dalam penelitian. Sugiyono (2011:240) menyatakan bahwa,

“dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*). Kriteria [*sic*], biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain...”.

#### 3.6.4 Studi Pustaka

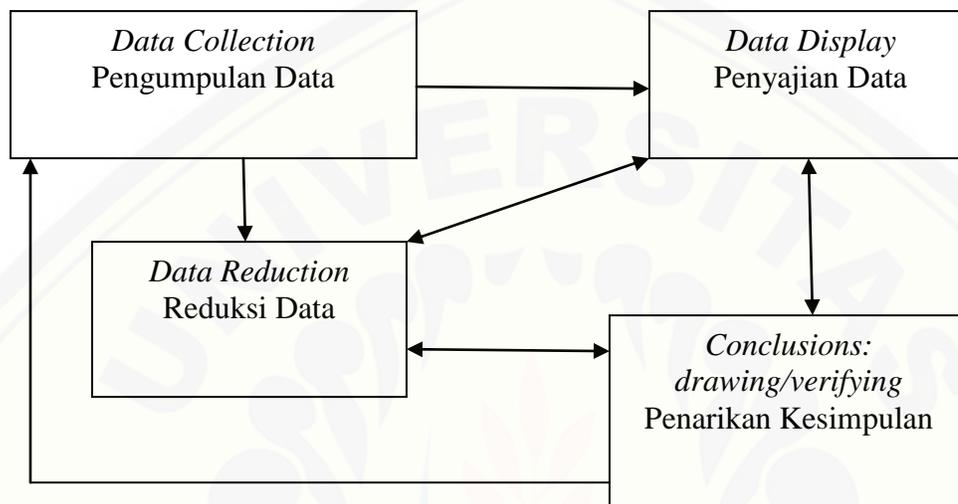
Studi pustaka dilakukan dengan cara mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian sesuai dengan teori yang ada agar penelitian berjalan dengan konsteksnya. Pada penelitian kali ini penulis banyak sekali menggunakan literatur yang didapat dari buku-buku atau literatur, jurnal, data dari media massa maupun internet yang dapat dijadikan acuan atau referensi tambahan yang dapat membantu untuk mendapatkan informasi.

#### 3.7 Metode analisis data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2005:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Miles and Huberman (dalam Sugiyono, 2011:246), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification* (penarikan kesimpulan). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut ini.

Gambar 3.1 Komponen-komponen analisis data Model Interaktif



(Sumber: Miles dan Huberman dalam Sugiyono, 2011:247)

### 3.7.1 Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Sehingga reduksi data memerlukan proses berfikir sensitif dan kecerdasan, keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.

### 3.7.2 Penyajian Data

Menurut Sugiyono (2011:249) menyatakan bahwa, "dalam Penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan

antar kategori, dan sejenisnya”. Dalam hal ini Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:249) menyatakan bahwa, “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif”. Penyajian data juga member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan bagi peneliti.

### 3.7.3 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian dan merupakan tahapan terakhir dari analisis data model interaktif. Sedangkan penarikan kesimpulan menurut Miles dan Huberman (1992:19) adalah, “hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung”. Peneliti berusaha untuk menganalisa, mencari pola serta tema, hubungan persamaan, dan hal-hal yang sering timbul sejak awal peneliti memasuki lokasi penelitian untuk mengumpulkan data.

## 3.8 Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan keabsahan data diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan data yang diperoleh peneliti. Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2005:330), “triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Menurut Patton (dalam Moleong, 2005:331) pada triangulasi dengan metode terdapat dua strategi, yaitu (1) pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian berupa teknik pengumpulan data dan (2) pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

## BAB 5 PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin di Desa Sucopangepok Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tahapan Penguatan Institusi

Pada tahap ini kegiatannya adalah mencari tokoh masyarakat yang memiliki jiwa sosial tinggi, kemudian tokoh tersebut dibekali untuk kemudian dijadikan kelompok masyarakat (pokmas). Pokmas kemudian dibentuk dan dibekali berkaitan dengan pelaksanaan pemberdayaan. Pokmas ini kemudian melakukan rembuk untuk menkaji kemiskinan yang dialami masyarakat, setelah mengetahui penyebab kemudian mencoba mengatasi kemiskinan dengan potensi wilayah yang dimiliki desa atau dusun. Hal ini diharapkan dapat dikembangkan dan menjadi tumpuan perekonomian masyarakat. Kemudian pokmas diajari pelatihan usaha mikro, mulai dari proses penyediaan bahan mentah hingga selling, pembukuan dan sebagainya. Selanjutnya adalah pembentukan LKMM, lembaga ini nantinya yang akan menyediakan modal bantuan kepada rumah tangga miskin sesuai dengan ketentuan, sehingga Pengurus LKMM dibekali dengan sejumlah pengetahuan. Pembekalan juga dilakukan kepada pokmas berkaitan dengan kewirausahaan, hingga pengelolaan modal

#### 2. Tahapan Evaluasi, Monitoring dan Pendampingan

Pihak operasi menugaskan petugas teknis untuk medampingi kegiatan pemberdayaan, selain itu juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha, perguliran dana, dan peningkatan pendapatan RTM seperti kegiatan admistrasi, membuat laporan, memasukkan dalam neraca dan sebagainya.

### 3. Tahapan Bantuan Permodalan

Tahapan selanjutnay adalah bantuan permodalan sebesar 25.000.000,00. Pelaksanaan pemberdayaan ini dilakukan sesuai dengan PTO, meski dilapangan ternyata bantuan permodalan ini tidak bisa bergulir. Hal ini salah satunya diakibatkan karena karakter masyarakat yang menilai bahwa bantuan ini cuma-cuma dan tidak perlu dikembalikan.

## 5.2 Saran

Penulis memberikan saran kepada pelaksana program agar pada kegiatan pemberdayaan atau bentuk lainnya perlu mengedepankan kehati-hatian agar program tepat sasaran agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Sehingga dana bantuan bisa bergulir untuk digunakan pada kelompok atau anggota yang lain.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Badan Pusat Statistik. 2011. *Jawa Timur Dalam Angka*. Jakarta : BPS
- Bungin, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Jember. 2005. *Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin*. Jember.
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Jember. 2005. *Petunjuk Teknis Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) Kabupaten Jember*. Jember.
- Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Jember. 2007. *Petunjuk Teknis Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kegiatan Pengembangan Klaster Bisnis Sub Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin*. Jember.
- Korten, David C. dan Sjahrir. 1998. *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, M. B. dan Huberman, A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan oleh Tjeptjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, J. Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rais, M. Amien. 1995. *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. Yogyakarta: ditya Media.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabes
- Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.

Sulistiyani, A. T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gaya Media.

Sumodiningrat, Gunawan. 2009. *Mewujudkan Kesejahteraan Bangsa, Menanggulangi Kemiskinan dengan Prinsip Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia.

Surjono, A. dan Nugroho T. 2008. *Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayu Media Publishing Lembaga Penerbitan dan Dokumentasi FIA-Unibraw.

Suryawati, C. 2005. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensial*. JMPK. Vol. 08/03/September. Semarang: Fakultas Kesehatan Masyarakat dan Magister Ilmu Kesehatan Universitas Diponegoro.

Suyanto, Bagong. 1996. *Perangkap Kemiskinan, Problem dan Strategi Pembangunan Desa*. Yogyakarta: Aditya Media.

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi kedelapan*. Jakarta: Erlangga.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Ketiga*. Jember: Jember University Press.

### **Peraturan perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Bupati Jember Nomor 50 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Jember.

### **Surat Keputusan**

Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil Menengah Kabupaten Jember Nomor: 518/1156/463.313/2005 tentang petunjuk teknis Pemberdayaan Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM).

**Internet**

Ant/BEY. 2010. *Jember Berpenduduk Miskin Terbesar di Jatim*. Nusantara/Rabu 10 Maret 2010. [http://metrotvnews.com /index.php/ metromain/news/2010/03 /10/12528/Jember-Berpenduduk-Miskin -Terbesar-di-Jatim](http://metrotvnews.com/index.php/metromain/news/2010/03/10/12528/Jember-Berpenduduk-Miskin-Terbesar-di-Jatim) (diakses 20 Oktober 2012).

